



REFLEKSI 30 TAHUN

HIDESI

Prolog

Alois A. Nugroho

Epilog

Mikhael Dua



Editor

Alexander Seran,
Benyamin Molan,
Yeremias Jena,
Kim See Kian,
Diah Asmarandani

REFLEKSI 30 TAHUN
HIDESI

Prolog

Alois A. Nugroho

Epilog

Mikhael Dua, M.A

Editor

Alexander Seran, Benyamin Molan, Yeremias Jena, Kim See Kian,
Diah Asmarandani

Penulis

Alois A. Nugroho, Johanis Ohoitumur, Franz Magnis-Suseso,
Stanislaus Reksosusilo, Armada Riyanto CM, J. Sudarminta, Gunardi
Endro, S. Margaretha K., Siti Rohmah Soekarba, Afra Ghina Rahmi,
Raja Oloan Tumanggor, Johan Hasan, Agus Purwadianto,
Valentino Lumowa, Yeremias Jena, Mikhael Dua



PENERBIT UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Refleksi 30 Tahun Hidesi

©Penerbit Universitas Atma Jaya

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Anggota IKAPI–Ikatan Penerbit Indonesia–Jakarta
Anggota APPTI–Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51

Jakarta 12930 Indonesia

Phone : (021) 5703306 psw. 631

E-mail : penerbit@atmajaya.ac.id

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

Cetakan Pertama, Juni 2021

Penulis : Alois A. Nugroho, Johanis Ohoitumur, Franz Magnis-Suseso,
Stanislaus Reksosusilo, Armada Riyanto CM, J. Sudarminta,
Gunardi Endro, S. Margaretha K., Siti Rohmah Soekarba, Afra
Ghina Rahmi, Raja Oloan Tumanggor, Johan Hasan, Agus
Purwadianto, Valentino Lumowa, Yeremias Jena, Mikhael Dua

Editor : Alexander Seran, Benyamin Molan, Yeremias Jena,
Kim See Kian, Diah Asmarandini

Layout Naskah : Adi Yuwono

Desain Sampul : Adi Yuwono

Refleksi 30 Tahun Hidesi

Dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2021

x + 349 halaman; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-6780-48-0 (PDF)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

Prolog (Prof. Dr. Alois A. Nugroho)	vii
BAGIAN 1: HIDESE DAN ETIKAWAN	
1. Hidesi dan Profesi Etikawan: Sejarah dan Refleksi 30 HIDESE (Johanis Ohoitimur)	2
2. Menghimpun Dosen-dosen Etika: 30 Tahun HIDESE (Franz Magnis-Suseno)	23
BAGIAN 2: MANUSIA, SEJARAH, DAN REVOLUSI MENTAL	
3. Man and History in the Bhagavad Gita and Hegel: A Comparative Study (Stanislaus Reksosusilo)	36
4. Revolusi Mental: Quasi-Realitas (Hermeneutika Metaforis-Naratif) (Armada Riyanto CM)	61
BAGIAN 3: ETIKA DAN KEBINEKAAN	
5. Etika Pluralisme Untuk Indonesia (J. Sudarminta)	92
6. Posisi Etika Bhinneka Tunggal Ika (Gunardi Endro)	109
BAGIAN 4: ETIKA DAN BUDAYA	
7. "Tritangtu": Kesatuan 'Tekad, Ucapan dan Lampah' dalam Kosmologi Budaya Sunda Lama (S. Margaretha K)	132
8. Isu Gender pada Masyarakat Multikultural Indonesia (Siti Rohmah Soekarba dan Afra Ghina Rahmi)	151
BAGIAN 5: ETIKA DAN PROFESI	
9. Kajian Filosofis atas Etika Profesi Psikologi (Raja Oloan Tumanggor)	176
10. Mempertimbangkan Pendekatan Prinsipisme dalam Entrepreneurship (Johan Hasan)	205

BAGIAN 6: ETIKA DAN PANDEMI KEDOKTERAN

11. Peluang yang Dihadirkan oleh Pandemi Covid-19
(Alois A. Nugroho) 228
12. Melampaui Bayang Kapitalisme dan Komunisme:
Belajar dari Fenomena Pandemi Covid-19 (Valentino Lumowa) 240

BAGIAN 7: ETIKA KEDOKTERAN

13. Penguatan Bioetika dan Humaniora
Kesehatan Era Pandemi Covid-19 (Agus Purwadianto) 272
14. Catatan Etis atas Reproduksi Buatan (Yeremias Jena) 287

Epilog (Mikhael Dua) 302

Indeks 319

Tentang Penulis 341

Menghimpun Dosen-dosen Etika: 30 Tahun HIDESE

Franz Magnis-Suseno
STF Driyarkara, Jakarta

1. Pendahuluan

Tiga puluh tahun lalu sahabat saya (sekarang Profesor) Dr. Kees Bertens mengambil prakarsa untuk mendirikan suatu himpunan bagi para dosen etika di Indonesia. Betapa tepat prakarsa itu terbukti oleh suksesnya. Sejak itu, setiap tahun (kalau tak salah ingat) HIDESE, Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, berhasil mengadakan konperensi sepanjang dua hari. Sekarang, 30 tahun kemudian, HIDESE tetap segar, jumlah peserta sudah mencapai lebih dari 130 orang dan semua tetap bersemangat.

2. HIDESE

Di konferensi terakhir, di tahun 2020, suasana memang sedikit redup. Redup karena untuk pertama kalinya kami terpaksa bertemu secara online. Tetapi kami tetap semangat. Seperti selalu kali ini pun 12 rekan membawa makalah yang menarik, inspiratif, kadang-kadang kontrovers. Konperensi-konperensi itu sekaligus menjadi tempat saling berkenalan dan berkomunikasi. Sesudah 30 tahun banyak dari para pemula di tahun-tahun pertama masih ikut: Romo Jon Ohoitumur (Pineleng), Romo Sudarminta (Driyarkara), Pak Achmad Charris Zubair (UGM), Romo Armada (Malang), Bu Irmayanti (UI), Pak Bambang Sugiharto (UNPAR), Pak Alois Nugroho dengan team Atmajaya: Yeremias Jena, Mikhael Dua, Alexander Seran yang begitu berjasa sampai hari ini dalam mendukung HIDESE, untuk menyebut beberapa saja. Bisa dikatakan, konferensi HIDESE selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan – dan bermanfaat.

Dari nama-nama tadi kelihatan bahwa banyak di antaranya adalah “Romo”, imam tertahbis Gereja Katolik. Namun itu tidak berarti bahwa HIDESE adalah usaha Katolik. Tetapi betul, 30 tahun lalu mayoritas dosen

etika masih Katolik dan “Romo”. Alasannya sederhana - dan menunjuk pada suatu kekurangan filsafat di Indonesia. Sejauh saya tahu, kecuali di Universitas Gadjah Mada dan di Universitas Indonesia malah sampai sekarang belum ada universitas negara dengan program studi filsafat. Di beberapa Universitas Islam Negara (UIN) memang ada program studi filsafat Islam. Juga di universitas-universitas swasta filsafat belum mencolok. Padahal pada universitas-universitas di Eropa dan Amerika mesti ada Philosophical Department.

Bahwa di Gereja Katolik, dan karena itu di sekian sekolah tinggi dan universitas Katolik, ada program studi filsafat dengan, antara lain, matakuliah etika, jadi pasti ada juga dosen etika, mempunyai alasan. Hukum Gereja Katolik (hukum kanonik) menetapkan bahwa orang hanya dapat ditahbiskan menjadi imam apabila ia sekurang-kurangnya sudah studi filsafat selama empat semester (dan teologi selama enam semester). Maka, karena pendidikan para calon imam dalam Gereja Katolik merupakan hal yang penting, Gereja Katolik dengan sendirinya selalu menyediakan pendidikan akademis dengan program studi filsafat. Di Indonesia ada – kalau tak salah – sepuluh tempat pendidikan imam: Di Pematang Siantar, di Pontianak, di Pineleng (Manado), di Abepura, di Ledalero (Maumere), di Surabaya, di Malang, di Yogyakarta, di Bandung dan di Jakarta. Mengingat etika termasuk matakuliah filsafat paling inti, maka di semua tempat ini sudah pasti ada dosen etika. Para dosen filsafat (dan teologi), termasuk para dosen etika, semua adalah lulusan studi magister, kebanyakan doktor, dalam ilmu filsafat, dan hampir semua dari universitas-universitas di luar negeri. Mereka hampir semua imam (pastor) karena mereka dimaksud mengajar di tempat pendidikan imam. Itulah sebabnya jumlah besar dosen etika di Indonesia Katolik dan imam.

Namun etika adalah mata kuliah filsafat. Dan filsafat itu ilmu yang justru tidak berdasarkan keyakinan agama tertentu. Satu-satunya dasar berfilsafat adalah rasionalitas: kesediaan untuk membenarkan suatu pendapat tanpa mengandaikan pandangan dunia, keyakinan agama atau esoteris tertentu, semata-mata didasarkan pada argumentasi yang meyakinkan. Karena itu filosof harus bisa, dan memang bisa,

berkomunikasi, dan itu berarti: berdebat, dengan siapa saja yang tidak apriori menyingkirkan rasionalitas atas nama suatu kepercayaan atau ideologi.

3. Etika Memang Penting

Mengapa lantas etika falsafi, dan komunikasi antara para ahli etika, begitu penting? Mengapa Indonesia, negara dengan paling banyak komunitas budaya dan religius yang berbeda, yang pernah saling menganggang asing, bisa bersatu? Di satu pihak komunitas-komunitas itu bersatu dalam pengalaman sebagai komunitas yang ditindas, dilecehi dan dihina oleh penjajahan asing. Di lain pihak komunitas-komunitas Nusantara itu memiliki tandon keyakinan dan tradisi etis-budaya bersama yang berhasil dirumuskan dengan baik dalam Pancasila. Sejarah politik bersama dalam penjajahan Hindia Belanda membangkitkan suatu kesadaran bahwa kita yang berbeda sama-sama bangsa Indonesia, hal mana menjadi mungkin karena komunitas-komunitas itu bersatu dalam pandangan-pandangan sosial-kemanusiaan paling dasar yang sama.

Tetapi kebersamaan budaya dan agama tradisional yang mendukung persatuan Indonesia tidak akan mencukupi untuk menghadapi tantangan masa depan. Dulu modernisasi, dan sekarang globalisasi dan digitalisasi membawa perubahan-perubahan yang besar dalam cara manusia, termasuk manusia Indonesia, melihat diri, masyarakat, kehidupan, agamanya. Berhadapan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diperlukan suatu kesatuan dalam pengertian dasar tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab", tentang sikap-sikap dasar moral. Dan kesatuan dasar itu memerlukan usaha etika.

John Rawls (*Political Liberalism*⁹) menegaskan bahwa komunitas-komunitas dengan nilai-nilai berbeda dapat hidup dalam kebersamaan apabila mereka mencari suatu overlapping consensus dalam pandangan mereka tentang apa yang adil. Berarti: Meskipun masing-masing komunitas mempunyai pandangan pandangan moral (dan budaya dan

9 Rawls, John 1993, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.

religius) yang berbeda, namun apabila mereka bersikap rasional dan positif mereka akan menemukan bahwa masih ada cukup kesamaan untuk memungkinkan suatu persatuan, misalnya persatuan politik. Namun *overlapping consensus* seperti itu tidak lagi mencukupi. Soalnya, *overlapping consensus* yang ditunjuk Rawls bersifat statis dan tetap hanya menyangkut sikap-sikap yang tradisional, yang sudah ada. Tetapi Indonesia – dan semua bangsa lain - menghadapi pembaruan dan tantangan mendalam yang melampaui orientasi etis tradisional. Konsensus berdasarkan kesamaan tradisi mesti semakin tipis berhadapan dengan tantangan-tantangan baru. Modernisasi, globalisasi, digitalisasi, tetapi juga mobilitas luar biasa masyarakat dengan sendirinya membawa kebingungan moral yang bisa membawa ke suatu disintegrasi sosial (di sini seharusnya masih disebut pengaruh disruptif, sering jahat, ideologi-ideologi sekuler dan agamis totaliter yang mengisi vacuum yang terjadi karena mundurnya pandangan-pandangan tradisional, dengan tuntutan-tuntutan mutlak yang secara eksplisit menolak pembenaran pada prinsip-prinsip etika).

4. Etika: Lebih dari *Overlapping Consensus*

Etika tidak berhenti pada suatu *overlapping consensus* faktual, melainkan mengusahakan suatu peluasan dan pendalaman pengertian etis yang bisa meluas menjadi konsensus dalam masyarakat dengan anggota dengan latar belakang budaya, sosial dan religius yang berbeda. Etika mencapai itu dengan menggali dasar-dasar dan implikasi-implikasi keyakinan-keyakinan moral. Ambil sebagai contoh toleransi. Indonesia mempunyai tradisi toleran kuat. Komunitas-komunitas Indonesia yang berbeda – lain dari misalnya komunitas-komunitas di Korea atau Jerman – sudah lama biasa dengan “multikulturalisme”, jadi dengan kenyataan bahwa di dekatnya ada komunitas dengan bahasa, adat-kebiasaan dan keyakinan religius berbeda, dengannya mereka berkomunikasi dalam pelbagai bentuk, misalnya dengan berdagang. Tetapi agama-agama, terutama agama-

agama monotheis (Assmann 2010¹⁰), Yahudi (di Indonesia tidak relevan), Kristiani dan Islam secara tradisional berkecenderungan tidak toleran (Islam dalam sejarah selalu masih lebih toleran daripada Kristianitas; baru revolusi intelektual 400 tahun lalu yang namanya Pencerahan “memaksa” Kristianitas menjadi toleran juga). Tetapi, misalnya Gereja saya, Gereja Katolik, di abad ke-20 mengalami perubahan pandangan mendalam yang dirumuskan secara resmi oleh Konsili Vatikan II (1962-65). Dalam Konsili itu Gereja Katolik secara resmi mengakui bahwa keselamatan ditawarkan Allah kepada semua orang, tidak tergantung agama mereka (*Lumen Gentium* nr. 16), bahwa manusia berhak asasi untuk mengikuti keagamaan yang diyakini dalam hatinya (*Dignitatis Humanae*, kebebasan beragama) dan bahwa dalam agama-agama lain ada yang “benar dan suci” (*Nostra Aetate* nr. 2). Toleransi beragama diyakini sebagai kewajiban etis mendasar. Begitu pula dalam Islam – yang di Barat menjadi kurban islamofobi, jadi disamakan dengan sikap ekstrem-intoleran – refleksi etis atas Al-Qu’ran dan kehidupan nyata Nabi Muhammad, tetapi juga banyak fakta sejarah, memperkuat keyakinan akan toleransi beragama. Refleksi atas agama dalam arah etis menghasilkan bukan sekedar overlapping consensus tentang toleransi, melainkan keyakinan semakin luas bahwa manusia, ya manusia beragama, wajib bersikap toleran kalau ia mau bersikap etis. Pernyataan bersama Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azar Ahmad Al-Tayyeb di Dubai 2019, tetapi sebelumnya juga sudah *A Common Word Between You and Us* (Surat 138 tokoh Muslim sedunia kepada para pemimin umat Kristiani), menunjukkan betapa dekat dua agama itu sebenarnya.

Jadi etika bisa mencapai sesuatu yang melebihi overlapping consensus. Etika tidak berhenti pada pencatatan pandangan moral yang sama. Etika mencari, dan mengklaim menemukan, apa yang seharusnya benar secara etis, entah sudah diyakini oleh suatu komunitas, entah belum. Etika itu lebih daripada sharing pandangan antara pihak yang berbeda. Melalui diskursus etika para peserta mencari apa yang memang benar. Dengan demikian cakupan konsensus moral terus meluas. Bisa

10 Assmann, Jan 2010, *The Price of Monotheism*, Stanford: Stanford University Press.

terjadi suatu kesepakatan global. Begitu misalnya paham hak asasi manusia yang muncul dalam konteks spesifik Inggris abad ke-17 akhirnya mencapai status global dengan *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB 1948. Di Indonesia dua presiden pertama, Sukarno dan Suharto, mencemoohkan hak-hak asasi manusia sebagai “individualisme” dan “liberalisme”, yang pertama atas nama gotong-royong (yang sudah lama tinggal omongan saja, Koentjaraningrat¹¹) yang kedua atas nama prinsip kekeluargaan (yang dalam kenyataan berarti “prinsip keluarga”, ya “keluargaku”). Akan tetapi di tahun 1993 Suharto pun menandatangani *Vienna Declaration on Human Rights* dan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan sekarang menjadi konsensus etis yang semakin meluas di Indonesia. Pengertian tentang hak-hak asasi manusia berdasarkan kesadaran etis bahwa manusia adalah makhluk bermartabat, martabat manusia itu berarti bahwa manusia merupakan nilai dan tujuan pada dirinya sendiri dan bahwa pelanggaran terhadap martabat manusia itu merupakan kejahatan. Hak-hak asasi manusia merincikan segi-segi kemanusiaan mana yang perlu dijamin agar martabat manusia dijamin. Paham hak asasi manusia menunjukkan bagaimana pendalaman diskursus etika bisa memperdalam pengertian manusia tentang martabatnya. Tidak mengherankan bahwa lama-kelamaan agama-agama pun menyadari serta mengakui bahwa menghormati hak-hak asasi manusia termasuk inti sikap yang dituntut Tuhan dari manusia.

5. Paus Fransiskus Bikin Heboh

Contoh lain tentang kemajuan pengertian bersama karena pendalaman pengertian etika adalah perkembangan kesadaran tentang hak dan kewajiban manusia dengan orientasi seksual bukan hetero – diringkas sebagai LGBTQ (lesbi, gay, bisexual, transsexual, queer). Agama-agama, khususnya juga Gereja Katolik, merasa susah menangani kenyataan bahwa sekitar sembilan persen umat manusia berorientasi seksual bukan

11 Koentjaraningrat 1961, *Some Social-Anthropological Observations on Gotong Royong Practices in Two Villages of Central Java*, Ithaca, N.Y.: Cornell University.

heteroseks. Barusan, pada 21 Oktober lalu (2020), beberapa pernyataan Paus Fransiskus dalam sebuah film dokumenter dengan judul “Francesco” menjadi publik. Dalam film ini Fransiskus menyatakan a.l. (kiranya dalam bahasa Italia): *“Homosexuals are children of God and have a right to a family.”* *“Nobody should be thrown out, or be made miserable because of it.”* Lalu kalimat yang paling menimbulkan perhatian: *“What we have to create is a civil union law, that way they are legally covered.”*

Gereja Katolik lama sekali menganggap segenap hubungan seks di luar perkawinan sah (tentu: perkawinan antara laki-laki dan perempuan) sebagai dosa berat. Dalam Perjanjian Lama hubungan homoseks diancam dengan hukuman mati (Lev 20,13), sedangkan Paulus mengecam seks antara laki-laki (Rom 1:26, dan efebofilia, hubungan lelaki dewasa dengan pemuda, 1 Kor 6:9; 1 Tim 1:10) sebagai tanda orang tidak beriman.¹² Baru dalam 50 tahun terakhir - di mana di negara-negara “Barat” diskriminasi terhadap manusia berdasarkan orientasi seksual sudah dihapus dan sikap Gereja Katolik banyak dikecam – terjadi perkembangan. Paus Johannes Paulus II menyatakan bahwa kecenderungan homoseks tidak merupakan dosa karena suatu kecenderungan merupakan kenyataan alami. Namun Beliau, maupun Paus Benedikt XVI, tetap mempertahankan bahwa kelakuan homoseks tidak dapat dibenarkan.

Paus Fransiskus memang jelas sekali tidak mau membuka sakramen perkawinan bagi pasangan sejenis. Begitu pula ia tetap menolak penyamaan “perkawinan” antar pasangan sejenis dengan perkawinan (biasa) antara laki-laki dan perempuan oleh negara. Yang dikehendaki Paus Fransiskus adalah perlindungan terhadap manusia-manusia dengan orientasi seksual berbeda dari diskriminasi, stigmatisasi dan persekusi. Karena itu ia minta supaya bagi pasangan homo yang mau hidup bersama disediakan ruang hukum oleh negara di mana mereka bisa hidup bersama secara legal (*same-sex civil union*), daripada dituduh asusila atau haram.

12 Bisa dilihat: Singgih, Emanuel Gerrit 2019, *Menafsir LGBT dengan Alkitab*, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Theologi, dan (2020), “Mendamaikan Kekristenan Dan LGBT: Sebuah Upaya Hermeneutik Alkitab”, DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i1.194.34-54>; Prior, John Mansford (2020), “Menafsir LGBT Dengan Alkitab”, DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i1.196.55-71>.

Tetapi sampai dengan Paus Benedikt, pendahulu Paus Fransiskus, Gereja Katolik selalu dengan tegas menolak segala pengakuan hukum terhadap keinginan hidup bersama pasangan sesama jenis. Mengapa? Karena hubungan seks antar manusia sejenis dianggap dosa dan karena itu Gereja akan menentang kalau negara memfasilitasi hubungan yang dianggap berdosa itu. Maka kalau sekarang Paus Fransiskus malah mendorong agar negara memungkinkan *same-sex civil unions*, implikasinya adalah bahwa hubungan seks antara manusia sejenis tidak lagi dengan sendirinya harus dianggap dosa. Suatu perubahan luar biasa dalam pandangan Gereja Katolik (dalam kenyataan sudah semakin banyak imam, tidak tanpa pengetahuan uskup mereka, bersedia memberi berkat non-sakramental kepada niat hidup bersama dua orang sejenis; padahal tak mungkin maksud hidup bersama diberkati kalau dianggap dosa).

Bagaimana kok bisa pimpinan Gereja Katolik mengambil sikap yang mengimplikasikan suatu perubahan mendasar dalam pandangan etis terhadap homoseksualitas? Tentu saja, Gereja Katolik juga tersentuh oleh revolusi seksual yang secara mendadak meledak di Amerika Serikat dan Eropa Barat di tahun 1960-an: Gerakan Hippies, New Left, Free Sex', dekriminialisasi pornografi dll. Tidak mungkin sikap keras-tegas-jelas sejak 2000 tahun bahwa segenap hubungan seks di luar perkawinan sah adalah dosa, tidak merasa tertantang. Namun Gereja Katolik tidak terkenal mengikuti "semangat zaman" begitu saja. Paus Fransiskus juga tidak. Selama 800 tahun, mengikuti Thomas Aquinas (1225-1247), etika Katolik mendasarkan diri pada etika hukum kodrat mengajar bahwa seksualitas diberikan kepada manusia (dan organisme-organisme lain) semata-mata demi untuk menjamin keturunan. Dari paham hukum kodrat itu etika Katolik, dan ajaran resmi Gereja, menarik kesimpulan bahwa hubungan seks hanya sah antara laki-laki dan perempuan dan dalam rangka kehidupan berkeluarga. Paus Pius XI (1857-1939) yang pertama kali menyatakan bahwa salah satu tujuan seksualitas adalah ekspresi cintakasih (*Casti Connubii*). Dalam Konsili Vatikan II kasih dinyatakan sebagai nilai inti hubungan antara suami dan isteri (*Gaudium et Spes*, 49). Hubungan seks dipahami sebagai ekspresi penyerahan diri total dalam

kasih antara suami isteri. Hubungan seks hanya demi mencapai nikmat, di mana partner tidak diminati demi dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai sarana nikmatnya sendiri, kehilangan martabatnya.

Tetapi, begitu ditanyakan selanjutnya, kalau ekspresi cinta menjadi maksud hubungan seks, kalau diakui bahwa orientasi homoseks merupakan kenyataan alami, jadi bukan dosa, apa alasan untuk menyatakan hubungan seks antar dua manusia sejenis tidak dapat dibenarkan? Mengapa cinta antar dua manusia sejenis tidak boleh diungkapkan juga secara seksual? Dan muncul pertanyaan-pertanyaan baru lagi (yang tidak disinggung oleh Paus Fransiskus): Mengapa hubungan seks hanya boleh dalam perkawinan? Mengapa tidak antar dua manusia yang saling mencintai, tetapi belum bisa kawin? Lalu di mana harus ditarik garis batas (kalau memang harus ditarik, menurut penulis ini harus ditarik!) terhadap *free sex, anything goes* asal atas dasar kesepakatan antara dua orang dewasa?

Ini semua pertanyaan untuk etika. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup kalau dijawab atas dasar perasaan atau pendapat pribadi atau tradisi komunal-agamis saja. Jadi juga tidak mungkin dijawab langsung atas dasar teologi. Perlu ada pertimbangan rasional yang objektif dan tahan uji. Yang jelas, seksualitas adalah segi kemanusiaan yang sangat hakiki di mana martabat, keselamatan dan identitas manusia dipertaruhkan, dan karena itu, begitu muncul pertanyaan, perlu dicari jawaban yang serius dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada segi tambahan. Bagi orang Kristiani – dan barangkali bagi orang beragama lain juga – pertimbangan etis selalu lebih daripada sekedar suatu usaha serius-jujur-rasional saja. Iman Kristiani menyatakan bahwa hati nurani manusia – ketertarikan mutlak di dasar jiwanya akan yang baik, adil, positif – berakar dalam keterbukaan dasar jiwa manusia terhadap realitas Ilahi sendiri. Dalam keseriusan pencarian sikap yang etis – dalam dorongan untuk bersikap betul-betul baik, untuk betul-betul menghormati martabat manusia-manusia yang terlibat – tarikan Roh Allah sendiri terasa. Sikap etis adalah lebih dari sikap etis, sikap etis adalah keterbukaan terhadap bimbingan Tuhan.

Maka sikap Paus Fransiskus yang menghebohkan itu bukan suatu penyesuaian diri dengan “semangat zaman”, melainkan berdasarkan keyakinan bahwa itulah yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita dapat menambah bahwa ini bukan masalah internal Katolik. Itu tantangan bagi umat manusia secara global. Di antara ketertutupan pandangan tradisional di satu pihak, dan sikap kebablasan liberalisme bahwa *anything goes* di lain pihak etika mencari pengertian bersama tentang bagaimana orientasi seksual yang disingkat dengan LGBTQ harus disikapi. Karena itu diskursus antara pencari etika dari budaya serta agama-agama yang berbeda amat penting. Dalam diskursus kita mencari pengertian bersama tentang seksualitas yang sesuai dengan martabat manusia dan dengan demikian juga sesuai dengan kehendak Dia yang menciptakan dan terus menyertai manusia, Tuhan.

6. Etika di Indonesia

Dengan demikian kita kembali ke HIDESE. Kiranya jelas betapa penting diskursus etika di alam akademis Indonesia. Bangsa paling majemuk di dunia, dengan identitas-identitas kultural dan agama yang berbeda, berhasil menjadi satu bangsa dan membangun satu negara karena dapat mendasarkan diri pada keyakinan-keyakinan religius dan etis yang dimiliki bersama (yang terungkap dan dirumuskan dalam Pancasila). Kesediaan untuk saling mengerti dan mencapai kesamaan visi dan solusi penataan kehidupan bangsa merupakan modal besar bagi persatuan bangsa (juga kalau kita membandingkan Indonesia dengan banyak negara lain di mana modal itu tidak nampak). Berhadapan dengan perubahan-perubahan mendalam konsensus tentang apa yang etis dan apa yang tidak terus harus dibaharui dan dicari baru.

Karena itu HIDESE adalah penting. Sudah selama 30 tahun HIDESE menjadi tempat di mana kita, para “ahli etika”, tidak hanya bertemu dan bertukar pandangan. Melainkan bersama-sama kita menghadapi tantangan dan masalah-masalah etis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, serta mencari solusinya. HIDESE sekarang semakin meluas.

HIDESI memungkinkan pemikir etika dari seluruh Indonesia, dan dari semua latar belakang agama, untuk bertemu. Diskursus yang oleh Jürgen Habermas diangkat sebagai tempat keberlakuan universal norma-norma etis dalam HIDESI menjadi kenyataan. Sekaligus HIDESI merupakan bukti hidup betapa di Indonesia perbedaan antara pelbagai budaya dan agama tidak lagi menjadi halangan. Kita para “aktivis” HIDESI serius berusaha untuk bersama-sama menangani pertanyaan-pertanyaan etis yang tak habis-habis dihadapi suatu bangsa dalam proses modernisasi menyeluruh yang masih jauh dari selesai.

Tentu saya mengharapkan agar HIDESI berjalan terus dan semakin berhasil menjadi tempat diskursus etis dalam bangsa Indonesia.[]